

**PERJUANGAN PARTAI BULAN BINTANG DALAM PENEGAKAN SYARI'AT  
ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR STRATA SATU SARJANA HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**ABD AZIZ  
03370316**

**PEMBIMBING:**

- 1. DR. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

DR. Ahmad Yani Anshori  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Abd Aziz

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abd Aziz  
NIM : 03370316  
Jurusan : JS  
Judul : Perjuangan Partai Bulan Bintang dalam Penegakan  
Syari'at Islam di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Jumadil akhir 1429 H  
30 Juni 2008 M

Pembimbing I



DR. Ahmad Yani Anshori  
NIP. 150276308

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

---

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Abd Aziz

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abd Aziz

NIM : 03370316

Jurusan : JS

Judul : Perjuangan PBB Dalam Penegakan Syari'at Islam Di  
Indonesia Perspektif Fiqh Siyisah

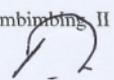
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Jumadats Tsaniah 1429  
30 Juni 2008

Pembimbing II

  
Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag  
NIP. 150289435

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/0 /2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Perjuangan Partai Bulan Bintang dalam  
Penegakan Syari'at Islam di Indonesia  
Perspektif Fiqh Siyasah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abd Aziz

NIM : 03370316

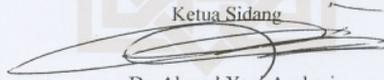
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Juli 2008 M/12 Jumadil Akhir 1429 H

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

### TIM MUNAQASYAH :

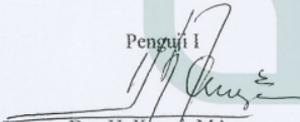
Ketua Sidang



Dr. Ahmad Yani Anshori

NIP. 150 276 308

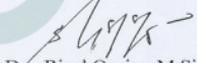
Penguji I



Drs. H. Kamsi, MA

NIP. 150 271 514

Penguji II



Drs. Rizal Qosim, M.Si

NIP. 150 256 649

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1429 H

24 Juli 2008 M



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah  
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 150 240 524

## MOTTO

اشهدوا بأنا مسلمون<sup>1</sup>

**“Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”**

خير الناس أنفعهم للناس

**“sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

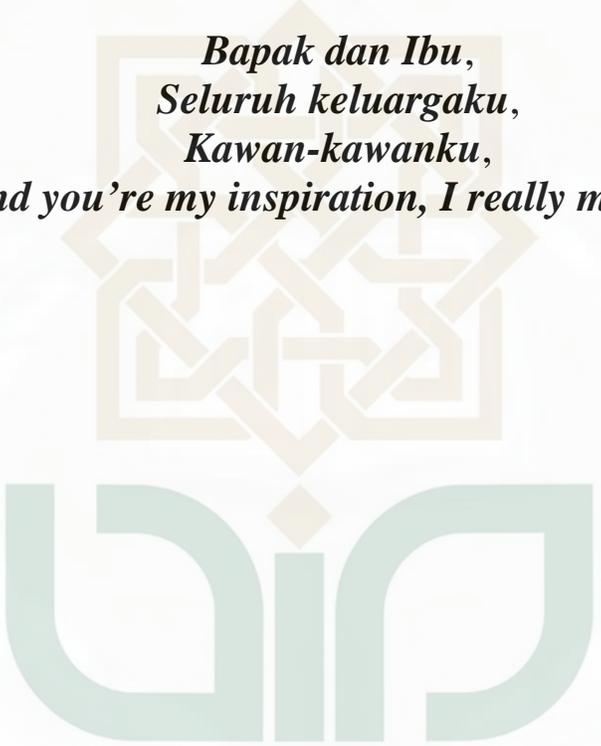
---

<sup>1</sup> Ali Imrān, (3): 64.

**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

*Bapak dan Ibu,  
Seluruh keluargaku,  
Kawan-kawanku,  
And you're my inspiration, I really mean it.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	B	-
	Ta'	T	-
	Ša	Š	S (dengan titik di atas)
	Jim	J	-
	Ḥa'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	-
	Dal	D	-
	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
	Ra	R	-
	Zai	Z	-
	Sin	S	-
	Syin	Sy	-
	Šad	Š	S (dengan titik di bawah)

	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
	Ghain	G	-
	Fa	F	-
	Qaf	Q	-
	Kaf	K	-
	Lam	L	-
	Mim	M	-
	Nun	N	-
	Wau	W	-
	Ha	H	-
	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
	Ya’	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba                      يَذْهَبُ - yazhabu  
 سُئِلَ - su'ila                      ذُكِرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ .....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و .....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa                      حَوْلَ - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
.....	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
..... <sup>و</sup>	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla	قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā	يَقُولُ - yaqūlu

### 3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - Raudah al-Jannah

طَلْحَةَ - Talhah

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا – rabbana

نُعِمَ - nu'imma

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلَالُ -al-jalalu

النِّعَمُ - al-ni'amu

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma\_ Muhammadun illa rasul

## KATA PENGANTAR

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره , أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد ا  
رسول الله و الصلاة والسلام على محمد النبي الأمي و على آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan hidayah dan inayah-nya sehingga setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Perjuangan Partai Bulan Bintang dalam Penegakan Syari’at Islam di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”*.

Selain itu, penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Untuk itu penyusun berkewajiban untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah sekaligus PA (Pembimbing Akademik) penyusun.
3. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Kamsi, MA dan Drs. Rizal Qosim, M.Si selaku penguji I dan penguji II yang telah berkenan memberi masukan dan kritikan atas kesempurnaan skripsi ini.

5. Staf Tata Usaha Jurusan JS Fakultas Syari'ah atas segala kemudahan yang diberikan.
6. Pengurus Partai Bulan Bintang DPW DI Yogyakarta, khususnya bapak Bambang dan bapak Jatmiko, terimakasih atas bantuan, waktu dan kemudahannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak (H. Nur Hasan) dan Ibu (Hj. Nur Hasanah) yang dengan penuh kesabaran mencurahkan seluruh hidup demi pendidikan penyusun, dan tak henti-hentinya selalu berdo'a untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun.
8. Seluruh keluargaku; Nenek, Kakek, Bibi, Paman, saudara-saudaraku, dan keponakanku, serta keluarga besarku "Bani Ahmad" yang telah memberikan semangat dalam setiap jengkal langkah kehidupan.
9. Semua kawan-kawan *LPM ARENA*; kalian adalah kawan sekaligus guru, *Front Perjuangan Pemuda Indonesia*; dengan kalian aku belajar memahami pluralisme dan belajar tentang Indonesia, *Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi*; yang telah mengajarkan kebijaksanaan yang begitu mulia, *kawan-kawan pesantren Mathali'ul Anwar*; kalian adalah teman yang cukup berkesan, *kawan-kawan Fs-KMMJ*; dengan kalian aku banyak belajar tentang makna kehidupan dan merasa bertanggung jawab atas madura.
10. Dan seluruh pihak yang tidak mungkin penyusun sebut satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Atas semuanya, tiada kata yang patut saya ucapkan kecuali semoga tuhan selalu melimpahkan anugerah dan kasih sayangnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih sebatas *intellectual exercise* dalam level pemula, sehingga diskusi, kritik dan masukan akan senantiasa berharga. Dan mudah-mudahan tetap memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan seluruh umat manusia..

Yogyakarta, 27 Jumadil Akhir 1429 H  
30 Juni 2008 M

Penyusun

Abd Aziz

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Abstrak

Runtuhnya rezim Orde Baru telah memberikan angin segar perubahan bagi dinamika politik, hukum dan sosial di Indonesia. Juga telah memberikan kebebasan bagi khalayak untuk mengekspresikan potensinya baik dalam ilmu pengetahuan, naluri politik sampai pada keyakinan atas sebuah ideologi (cara pandang membaca masyarakat dan strateginya). Dalam kanvas sejarah Indonesia mulai 1999-2008, tercatat dua kali pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai politik dengan *platform* yang cukup kompleks dan plural. Salah satu partai politik kontestan pemilu adalah Partai Bulan Bintang. Sebagai partai yang bersaskan Islam, PBB menginginkan pemberlakuan Syari'at Islam melalui konstitusi. Bagi PBB, hanya dengan cara tersebut Syari'at Islam dapat diberlakukan dan ditegakkan. Indonesia sebagai negara plural, perjuangan penegakan Syari'at Islam secara konstitusi tidak mudah terealisasi karena bermacam-macam ideologi serta kepentingan politik yang melingkupinya. Dari latar belakang tersebut, pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah strategi perjuangan PBB dalam penegakan Syari'at Islam di Indonesia secara konstitusional.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library reserach*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan historis dengan tujuan untuk mengetahui socio-politik yang melatar belakangi konfigurasi yang terjadi. Dalam diskursus ini penyusun menggunakan teori politik Islam dan *siyāsah dustūriah* sebagai kerangka besarnya karena kajian ini mencakup persoalan bentuk negara dan penetapan hukum yang sesuai dengan syari'at. Dalam kajian politik Islam, ada tiga paradigma pemikiran yang mengkaji tentang relasi antara Islam dan negara, yaitu; integral, sekuler dan simbiosis mutualistik. Syafi'i Maarif menyebut diskursus dialektika Islam dan negara sebagai Islam politik. Ia mengkategorikan Islam politik di Indonesia dalam dua kategori, antara lain: Islam sejarah dan Islam cita-cita. Islam sejarah adalah Islam yang terealisasi dalam kehidupan sehari-hari atau disebut juga dengan Islam realitas. Sedangkan Islam cita-cita adalah Islam yang diidealkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi cenderung utopia, seperti Khilafah Islamiyah.

Dalam ranah politik, perjuangan pemberlakuan Syari'at Islam secara konstitusi dipelopori oleh beberapa partai Islam, salah satunya PBB (Partai Bulan Bintang). Partai Bulan Bintang beranggapan bahwa urusan agama dan negara tidak dapat dipisah, keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Salah satu perjuangannya adalah upaya memasukkan Piagam Jakarta dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, karena bagi PBB, hanya dengan cara tersebut Syari'at Islam dapat diberlakukan secara konstitusional. Selain upaya memasukkan konsep Piagam Jakarta, hal spesifik dalam strategi perjuangannya dalam penegakan Syari'at Islam dalam makna untuk menghapus berbagai perundang-undangan dan berbagai peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti narkoba, pornografi dan berbagai hal yang memicu kriminalitas. Otonomi Daerah juga menjadi salah satu peluang bagi PBB dalam strategi perjuangan pemberlakuan Syari'at Islam, seperti Aceh, Garut, Banten dll. Dengan adanya Otonomi Daerah ini, peluang yang paling jitu adalah memasukkan nilai-nilai Syari'at Islam dalam Peraturan Daerah (Perda). Sejauh yang bisa dilakukan, PBB tetap konsisten dengan visi dan misi partainya sebagai partai Islam. Bagi PBB yang terpenting bukan hasil tetapi proses perjuangannya dalam menegakkan syi'ar-syi'ar Islam melalui jalan struktural karena perjuangan penegakan Syari'at Islam merupakan manifestasi dari iman seseorang.[]

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
<b>A.   Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B.   Pokok Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C.   Tujuan Dan Kegunaan .....</b>	<b>5</b>
<b>D.   Telaah Pustaka .....</b>	<b>5</b>
<b>E.   Kerangka Teoritik .....</b>	<b>7</b>
<b>F.   Metodologi Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>G.   Sistematika Bahasan .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II       DASAR-DASAR POLITIK DAN</b>	
<b>PENEGAKAN SAYARI'AT ISLAM</b>	
<b>A.   Dasar-Dasar Politik Islam .....</b>	<b>16</b>
<b>B.   Perjuangan Penegakan Syari'at Islam Dalam Kanvas Sejarah</b>	<b>24</b>

1.	Masa Orde Lama .....	24
	a). Kendaraan Politik Umat Islam .....	24
	b). Upaya Penegakan Syari'at Islam .....	32
2.	Masa Orde Baru .....	40
3.	Pasca Reformasi .....	47
<b>BAB III</b>	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	
	<b>DAN PERJUANGAN PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM</b>	
A.	Sejarah Lahirnya Partai Bulan Bintang .....	54
B.	Asas Dan Tujuan Partai .....	63
C.	Visi Dan Misi Partai .....	68
D.	Pandangan PBB Terhadap Syari'at Islam .....	71
E.	Perjuangan PBB Dalam Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia	
	1). Latar belakang perjuangannya .....	77
	2). Piagam Jakarta dan perjuangan Syari'at Islam .....	80
	3). Perbedaan dan Persamaannya dengan Partai Islam lain	88
	4). Kegagalan PBB dalam Perjuangannya .....	92
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	95
B.	Saran-saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>98</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- <b>Terjemahan</b> .....	<b>I</b>
- <b>AD/ART PARTAI PBB</b> .....	<b>IV</b>
- <b>Out Line</b> .....	<b>V</b>
- <b>Surat Rekomendasi</b> .....	<b>VI</b>
- <b>Biografi tokoh</b> .....	<b>VII</b>
- <b>Curikulum Vitae</b> .....	<b>IX</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya rezim Orde Baru yang diawali krisis moneter pada tahun 1997-1998, telah memberikan peluang untuk menata kembali kehidupan politik, ekonomi dan hukum. Tuntutan penataan kembali sistem politik, ekonomi dan hukum dikenal sebagai tuntutan reformasi total atau menyeluruh.<sup>1</sup> Namun untuk mencapai semua itu, dibutuhkan langkah kongkrit, seperti pemilu.<sup>2</sup>

Reformasi juga menjanjikan harapan baru bagi perubahan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menentukan sikap politiknya. Ide demokrasi diusung sebagai simbol perubahan dari kondisi sebelumnya yang dinilai telah terjadi kemandegan demokrasi.<sup>3</sup> Bahkan munculnya banyak partai politik baru dengan bermacam ideologi merupakan warna baru dalam perpolitikan Indonesia pasca pemilu 1955 dan 1971 yang diikuti banyak parpol.

---

<sup>1</sup> Syamsudin Haris, "Kekuasaan Transisional: Problem Penyelenggaraan Pemilu 1999", dalam Juri Ardiantoro F, *Transisi Demokrasi; Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, (Jakarta: KIPP, 1999), hlm 17.

<sup>2</sup> Pasca reformasi 1998, pemilu telah diadakan dua kali dengan sistem yang berbeda. Pada pemilu pertama (7 Juni 1999) diikuti oleh 48 parpol dengan bermacam ideologi, sedangkan pemilu kedua, dilaksanakan pada tahun 2004 yang diikuti 24 parpol dengan sistem pemilihan presiden langsung.

<sup>3</sup> S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto, *Pergulatan Ideologi Partai Politik di Indonesia; Nasionalisme, Islamisme, Komunisme, Militerisme*, (Jakarta: Inti Media Publisher, 2006), hlm 1.

*Euforia* partai politik dengan sekian ideologinya menjadi warna demokrasi dewasa ini. Bahkan beberapa negara di penjuru dunia masih mendasarkan prospek-prospek politiknya pada berbagai ideologi yang dianutnya. Adanya ideologi politik sebagai konsentrasi utama menjadi sebab utama pula terjadinya berbagai warna demokrasi di masing-masing negara, di mana setiap negara dewasa ini menjunjung tinggi arti demokrasi. Berbagai ideologi politik yang ada dirumuskan dalam bentuk isme-isme, seperti komunisme, fasisme, kapitalisme, sosialisme, pan-islamisme, dan juga ideologi Pancasila.<sup>4</sup>

Di sisi lain, pasca reformasi pemberlakuan Syari'at Islam mulai menjadi tuntutan dan aspirasi sebagian kelompok Islam untuk memformalisasikan Islam secara keseluruhan. Pasca otonomi daerah, berbagai daerah banyak menelorkan Perda Syari'ah sebagai bentuk riil dari perjuangan pemberlakuan Syari'at Islam secara konstitusional, seperti Aceh, Banten dan daerah lainnya.<sup>5</sup> Secara konstitusi, formalisasi Syari'at Islam ini diperjuangkan oleh Partai Islam di parlemen, seperti

---

<sup>4</sup> Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-Nilai Politik*, cet. I, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm 1. Menurut hemat penyusun bahwa banyaknya partai politik pasca reformasi 1998 merupakan metamorfosis dari partai politik yang pernah ada dan hidup di Indonesia, seperti empat partai besar pemenang pemilu tahun 1955, yaitu Masyumi, PNI, NU, bahkan PKI. Hal ini dapat dilihat dari *platform* partai, jargon politik maupun ideologinya. Tentu fenomena ini akan mengulang romantisme masa lalu. Bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Sukarno sering membagi aliran ideologi yang hidup di Indonesia menjadi Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.

<sup>5</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, "Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Beberapa Soal yang Segera Dirumuskan" Prolog dalam buku *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, cet.I, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. xiii.

PPP, PBB dan PK. Namun perjuangannya tidak berjalan mulus karena tidak didukung oleh suara mayoritas parlemen.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara plural, tentu praktik perjuangan untuk memberlakukan Syari'at Islam sulit dilaksanakan. Di internal Umat Islam sendiri ada tiga kelompok dalam pemahaman Syari'at Islam dan penerapannya, yaitu; pertama, mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama (syari'at) Islam secara formal sebagai hukum positif. Kedua, mereka yang hanya mendukung pelaksanaan etika moral dan menolak formalisasi dan juga keterlibatan agama dalam konteks kehidupan bernegara. Ketiga, mengambil jalan tengah (*middle way*), mereka yang mendukung formalisasi syari'at untuk hukum-hukum privat tertentu, tetapi untuk lainnya cukup dengan menjadikan ajaran Islam sebagai sumber etika moral atau input bagi hukum nasional dan kebijakan publik lainnya.<sup>7</sup>

Dalam diskursus ini, salah satu partai yang mencantumkan Islam sebagai ideologinya adalah PBB (Partai Bulan Bintang) dan mempunyai visi terwujudnya

---

<sup>6</sup> <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0202/11/nas07.html>, diakses 12 April 2008. PBB (Partai Bulan Bintang) sebagai salah satu dari partai politik yang menjadikan Islam sebagai ideologinya, menginginkan pemberlakuan Syari'at Islam melalui jalan konstitusi, seperti undang-undang. Hal yang spesifik dari PBB yakni memperjuangkan Syariat Islam dalam makna untuk menghapus berbagai peraturan perundangan yang bertentangan dengan nilai Islam. Kemudian PBB akan mengedepankan anti-maksiat, narkoba dan berbagai hal yang memicu kriminalitas. Berita *Sinar Harapan* (Sabtu, 21 Februari 2004).

Salah satu bentuk perjuangan PBB melalui jalan konstitusi adalah upaya Partai Bulan Bintang dalam proses amandemen UUD 1945, khususnya pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 tentang dasar Negara dan juga perjuangannya dalam memasukkan konsep Piagam Jakarta dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 tentang agama. Lebih jelasnya lihat dalam risalah rapat pleno ke-28 panitia ad hoc I badan pekerja MPR 17 Juni 2002, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR, 2002), hlm. 22-25.

<sup>7</sup> Maskuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, cet.I, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 6-7.

kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Dengan visi ini pula, PBB ingin memposisikan diri sebagai partai politik Islam terdepan yang konsisten ingin memperjuangkan Syari'at Islam di Indonesia. Salah satu poin penting adalah konsep Piagam Jakarta yang dipandang paling ideal dalam formalisasi Syari'at Islam dalam konstitusi, karena hanya dengan jalan itulah pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia dapat ditempuh.<sup>8</sup>

Untuk mencapai visi dan misi partai, PBB tentu menyusun strategi perjuangan partai. Di antaranya; Pertama, pembinaan ukhuwah Islamiyah dengan menghormati pluralitas kehidupan berbangsa. Kedua, penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok dan antar agama. Ketiga, penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok dan antar bangsa. Keempat, konsolidasi dan pemberdayaan partai. Kelima, PBB menjadi aset umat dan memelopori penyatuan partai-partai Islam.<sup>9</sup>

Dari gambaran ini, penyusun hendak menelusuri secara ilmiah tentang perjuangan PBB dalam pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia dan juga Islam sebagai ideologinya. Dalam penelitian ini, penyusun lebih fokus pada judul **"Strategi Perjuangan Partai Bulan Bintang dalam penegakan Syariat Islam di Indonesia perspektif fiqh siyasah."**

---

<sup>8</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2004), hlm. 56.

<sup>9</sup> Komentor Sahar L. Hassan, Wakil Ketua Umum DPP PBB, "PBB Konsisten Perjuangkan Syariat Islam," *Berita Sinar Harapan*, (Sabtu, 21 Februari 2004).

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, yang dapat dijadikan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana Strategi Perjuangan PBB (Partai Bulan Bintang) dalam Penegakan Syari'at Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

- Mengetahui strategi perjuangan Partai Bulan Bintang dalam penegakan Syari'at Islam di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kajian ini akan memberi kontribusi penting tentang perjuangan PBB dalam penegakan atau pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia.
2. Kajian ini sebagai bagian kontribusi bagi proses *Nation Character Bulding*.

## **D. Telaah Pustaka**

Sebelum masuk pada penelitian ini, terdapat beberapa literatur yang dapat membantu memetakan persoalan tentang perjuangan pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia, khususnya pasca terbukanya kran demokrasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Salah satunya adalah buku karya Maskuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at*

*Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas.*<sup>10</sup> Buku ini berupa kumpulan tulisan yang ditulis oleh banyak orang. Dalam buku ini terdapat tiga sub bab yang masing-masing menjelaskan tentang Syari'at Islam dalam konteks modern di Indonesia, formalisasi Syari'at Islam dalam kontes otonomi daerah, seperti Banten dan Aceh, dan Syari'at Islam dalam perspektif orang-orang ormas. Namun dalam buku ini sama sekali tidak menjelaskan tentang konsep dan perjuangan PBB mengenai pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia.

Buku lainnya H. Untung Wahono, *Penegakan Syari'at Islam dan Koalisi Partai: Menjawab Tuduhan Terhadap PK Sejahtera.*<sup>11</sup> Buku ini hanya menjelaskan pandangan PKS tentang Syari'at Islam dan klarifikasi koalisinya dengan PAN dalam fraksi reformasi, serta konsep koalisi partai dalam persepsi PKS. Dalam buku ini juga disinggung tentang wacana Piagam Jakarta pasca reformasi, akan tetapi sama sekali tidak menjelaskan tentang partai PBB.

Sedangkan skripsi yang membahas Partai Bulan Bintang relatif sedikit. Salah satunya adalah karya Ahmad Afifuddin, *Sistem Pemerintahan di Indonesia dalam Pandangan Partai Bulan Bintang.*<sup>12</sup> Dalam skripsi ini, Ahmad Afifuddin lebih mengkaji tentang sistem pemerintahan kontes keindonesiaan dalam pandangan partai PBB. Ia membahas sistem pemerintahan secara umum dan juga sistem

---

<sup>10</sup> Maskuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, cet.I, (Jakarta: Renaisan, 2005).

<sup>11</sup> H. Untung Wahono, *Penegakan Syari'at Islam dan Koalisi Partai: Menjawab Tuduhan Terhadap PK Sejahtera*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003).

<sup>12</sup> Ahmad Afifuddin, "Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dalam Pandangan Partai Bulan Bintang," *Skripsi* Fakultas Syariah, tidak diterbitkan, 2003.

pemerintahan dalam pandangan PBB. Dalam skripsi ini juga dibahas sedikit tentang Piagam Jakarta. Namun dalam skripsi ini sama sekali tidak membahas secara spesifik pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia. Dan juga belum menyinggung tentang perjuangan PBB dalam upaya pemberlakuan Syari'at Islam, baik melalui parlemen maupun dalam bentuk Perda Syari'at Islam.

Sedangkan dalam pemberitaan media massa, penyusun mendapatkan beberapa berita dari media massa yang membahas peran PBB dalam pembahasan amandemen UUD 1945 pasal 29 tentang agama dan pencalonan presiden secara langsung.<sup>13</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Selanjutnya, untuk mempertajam dan menghindari deskripsi dan eksplanasi yang kurang penting, penyusun akan menggunakan kerangka teori sebagai panduan dan pembatas. Lebih dari itu, kerangka teori ini juga penting untuk mempertajam kepekaan dalam melihat data.<sup>14</sup>

Dalam kajian ini, penyusun menggunakan kerangka teori politik Islam (*fiqh siyāsah*). Menurut J. Suyuthi Pulungan, secara garis besar meliputi; Pertama, *Siyāsah Dustūriyyah* yang mencakup persoalan bentuk negara, tata negara, penetapan hukum yang sesuai syari'at, administrasi negara dan hubungan masyarakat dengan penguasa

---

<sup>13</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0005/01/nasional/pres07.htm>, diakses 28 April 2008.

<sup>14</sup> Atho' Mudzhar, "Penelitian Agama dan Keagamaan," *Makalah* untuk Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-Dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

negara. Kedua, *Siyāsah Daulīyah/kharījah* yang meliputi pengaturan masalah pergaulan antara Negara Islam dan pergaulan dengan negara-negara bukan Islam. Ketiga, *Siyāsah Māliyah* yang meliputi masalah pengaturan perekonomian, hak-hak orang miskin dan masalah sumber ekonomi, misalnya sumber-sumber mata air. Keempat, *Siyāsah Harbīyah* yang mengatur masalah peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.<sup>15</sup> Kajian ini menyangkut tentang politik yang muncul dari pemikiran hubungan antara Islam dan negara, khususnya tentang perjuangan partai PBB dalam penegakan Syari'at Islam di Indonesia dengan jalan formal atau melalui proses struktural (negara), maka penyusun mengambil teori *Siyāsah Dustūriyyah* sebagai kerangka besarnya.

Dalam ilmu politik, istilah “negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi satu kelompok yang besar. Kelompok itu berkumpul lagi sehingga menjadi satu desa. Desa bergabung lagi, demikian seterusnya, sehingga muncul negara yang sifatnya masih merupakan satu kota atau *polis*. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang *geneologis*, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian, menurut Aristoteles, adanya negara itu berdasarkan kodrat. Manusia

---

<sup>15</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 40.

<sup>16</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. XX (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 38.

sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak bisa dipisahkan dari negara, karena manusia adalah *zoon politicon* (mahluk sosial) yang selalu hidup bermasyarakat.<sup>17</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa negara adalah sebuah gejala historis yang kemunculan, bentuk dan wataknya sangat tergantung pada pengaruh-pengaruh yang bersifat rekayasa. Sebagaimana negara tak dapat dipisah dari ilmu politik yang mempunyai suatu cara untuk mencapai kekuasaan. Sehingga perwujudan negara sangat tergantung pada kondisi-kondisi politik. Sebaliknya juga konfigurasi politik sering terwujud seruang dengan bentuk negara.

Sementara agama adalah sekumpulan ajaran yang bersifat transenden. Semua ajaran diyakini sebagai kebenaran yang tak terbantahkan, sebab ia merupakan agama yang diturunkan oleh Tuhan melalui rasulnya. Islam sebagai salah satu agama samawi memahami bahwa Tuhan memiliki aturan agung untuk alam semesta ini. Alam semesta raya ini hanya berjalan sesuai aturan yang telah dirancang dengan cermat dan cerdas. Islam meyakini bahwa semesta raya ini merupakan kerajaan Tuhan Allah. Dialah yang menciptakannya. Tuhan yang mengendalikan setiap serat kehidupan kita, dan tidak seorangpun yang dapat lolos dari sisir-Nya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 40-41.

<sup>18</sup> Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa, Asep Hikam, cet VI (Bandung: Mizan, 1998), hlm 66. Abu A'la al-Maududi menegaskan bahwa syari'ah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan. Maududi juga menawarkan sistem pemerintahan dengan istilah "teo-demokrasi" yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi, suatu sistem kedaulatan rakyat yang dibatasi kedaulatan Tuhan lewat hukum-hukumnya.

Mekanisme yang menghubungkan antara agama dan negara inilah yang melahirkan bermacam-macam konsepsi. Dalam Islam sendiri ada beberapa kecenderungan yang mendasari teori-teori politiknya.

Seperti yang telah umum diketahui, bahwa narasi besar yang mendasari teori-teori mengenai hubungan Islam dan negara adalah tiga paradigma pemikiran, yaitu: pertama, paradigma integralistik (*unified paradigm*). Dalam pandangan ini agama dan negara adalah integral. Negara merupakan lembaga politik sekaligus keagamaan, maka kepala negara adalah pememipin negara. Kedua, paradigma simbiotik. Agama dan negara saling membutuhkan walaupun keduanya lembaga yang berbeda. Ketiga, paradigma sekularistik. Sebagaimana artinya, urusan agama bukan dan tidak boleh diintervensi oleh negara.<sup>19</sup>

Perbedaan konsepsi mengenai relasi Islam dan negara juga sempat menjadikan wajah perpolitikan Indonesia menegang. Tingkat ketegangan itu makin meningkat tajam diakibatkan terjadinya benturan pandangan antara kelompok nasionalis Islam dengan kelompok nasionalis sekuler.

Pendapat salah satu tokoh nasionalis, Soekarno —seorang pembela pemisahan agama dan negara— bahwa Islam di Indonesia bukanlah urusan negara. Bagi

---

<sup>19</sup> Marzuki Wahid dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 26-28. lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 1-2. Bandingkan dengan Faisal Basir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 96. Setidaknya ada dua paradigma pemikiran Islam yang berkembang di dunia kaum muslimin mengenai hubungan antara agama dan negara, tak terkecuali di Indonesia, seperti yang ditulis oleh Syafi'i Anwar dalam pengantar buku Abdurrahman Wahid "*Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*." Paradigma itu adalah substantif-inklusif, dan legal-eksklusif.

Soekarno agama merupakan urusan spiritual dan pribadi, sedangkan negara adalah persoalan dunia dan kemasyarakatan<sup>20</sup> Sementara itu, sebagian kalangan Islam berpandangan bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, hukum-hukum yang diberlakukan dalam sebuah negara harus didasarkan pada tiga prinsip: Pertama, kesatuan wilayah Islam. Kedua, kesatuan rujukan syari'at yang tertinggi, yang tercermin dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketiga, kesatuan kepemimpinan yang tersentralisir yang tercermin dalam pemimpin yang tertinggi atau khalifah, yang memimpin Daulah Islam dengan Umat Islam.<sup>21</sup>

Maka, di sini aksi-aksi atau tindakan politik seseorang adalah sebagai alat ukur utama dalam menentukan tipologi pikiran politiknya. Tindakan politik apa yang diambil adalah cerminan dari keyakinan ideologisnya. Artinya, kajian ini hendak mendeskripsikan sejarah politik Islam di Indonesia di atas realisme sejarah. Melihat masalah respon Islam terhadap negara dalam dimensi, Islam tidak ditentukan sebagai kumpulan normatif atau konsepsi Islam mengenai politik, suatu gejala tindakan-

---

<sup>20</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, cet, I (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 94. Mengenai gagasan Soekarno tentang negara dapat dilihat dalam karya orisinalnya, Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitia Penerbitan di Bawah Bendera Revolusi, 1964).

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), hlm. 46.

tindakan kelompok-kelompok orang, individu ataupun organisasi Islam yang memberi reaksi ataupun respon politik terhadap republik.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*)<sup>23</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan umum, perpustakaan pribadi, sekretariat Partai Bulan Bintang dan internet, baik berupa buku, majalah, artikel, dan naskah-naskah lain.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan objek yang diteliti.

---

<sup>22</sup> Fahri Ali, kata Pengantar, *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1984). Lihat juga Ahmad Syafi'i Maarif dalam buku *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985). Ia mengkategorikan tentang Islam politik dalam dua kategori, antara lain: Islam sejarah dan Islam cita-cita. Islam sejarah adalah Islam yang terealisasi dalam kehidupan sehari-hari atau disebut juga dengan Islam realitas. Sedangkan Islam cita-cita adalah konsep Islam yang diidealkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi cenderung utopia, seperti khilafah Islamiah.

<sup>23</sup> Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan sebuah penelitian, baik melalui sumber data primer maupun sekunder. Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26. Lihat juga Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.

### 3. Sumber Penelitian dan teknik pengumpulan data.

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data yang relevan. Dalam hal ini akan dibedakan menjadi dua jenis sumber data; primer dan sekunder. Di samping itu sebagai pengayaan bahan pembahasan akan digunakan sumber-sumber penopang lainnya.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah; Pertama, studi pustaka seperti buku, artikel, majalah dan data-data lain yang terkait dengan objek penelitian. Kedua, teknik dokumentasi<sup>24</sup> yaitu berupa AD/ART partai PBB, tafsir asas PBB dan dokumen PBB lainnya.

Ketiga, *free interview*<sup>25</sup> yaitu teknik wawancara bebas dengan pengurus dan fungsionaris partai PBB tentang perjuangan perberlakuan Syari'at Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai pelengkap data dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

---

<sup>24</sup> Pada dasarnya data-data yang tersebar di berbagai dokumen tidak hanya dikhususkan untuk penelitian sejarah, namun data dokumentatif ini juga dapat digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu yang lain, termasuk sosial politik. Dokumen sebagai bahan klasik digunakan untuk menjawab persoalan tentang apa, siapa, kapan dan di mana dan bagaimana (dalam bahasa jurnalistik disebut metode reportase dengan prinsip 5 W + 1 H). Adapun dokumen yang terdapat di Indonesia sebagai mana diidentifikasi oleh Sartono Kartodirdjo, yaitu: 1. Otobiografi, 2. Surat pribadi, buku-buku, catatan harian, memoer, 3. Surat kabar, 4. Dokumen pemerintah, 5. Roman dan cerita rakyat. Lihat Sartono Kartodirdjo, "Metode Pengumpulan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm 44-48.

<sup>25</sup> *Free interview* adalah jenis wawancara tak berstruktur, di mana pewawancara yang memakai teknik ini biasanya hanya dibimbing oleh *interview guide* yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang ingin dipersoalkan oleh pewawancara. Lihat J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 93. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa *free interview* adalah teknik wawancara yang tidak mempunyai pusat, pertanyaan yang diajukan biasanya berpindah-pindah dari satu pokok masalah ke pokok masalah lain, sementara data yang diperoleh bisa beragam. Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 139.

### 3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah tahap analisa data. Tahap ini sangat menentukan terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu analisis dengan mengolah data-data yang kemudian data tersebut digeneralisir, diklasifikasikan, dan kemudian dianalisa.

### 4. Pendekatan

Menyadari bahwa penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat bergantung pada pendekatan yang dipakai, maka diperlukan sebuah pendekatan untuk menopang operasional metode yang ada. Hal ini sekaligus untuk membantu dalam memilih aspek, dimensi dan unsur-unsur yang harus lebih ditonjolkan. Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan historis atau pendekatan sejarah dengan titik tekan pada politik kenegaraan,<sup>26</sup> untuk mengetahui latar belakang sosio-politik yang menjadi situasi khusus dari pergulatan ideologi politik sebagai sebuah konfigurasi politik.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun akan mensistematiskan pembahasan sebagai berikut:

Bab I, akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan

---

<sup>26</sup> Menegenai pendekatan ini dan berbagai pendekatan dalam penelitian, lihat Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, cet. 2, (Jakarta: Gramidia, 1993), hlm. 4.

sistematika pembahasan, untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab II akan digambarkan secara umum tentang dasar-dasar politik dan pemberlakuan Syari'at Islam, seperti; dasar-dasar politik Islam, perjuangan penegakan Syari'at Islam dalam kanvas sejarah, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru sampai Era Reformasi guna mengetahui sosio-historis perjuangan formalisasi Syari'at Islam dalam kanvas sejarah Indonesia.

Bab III, akan dijelaskan tentang PBB dan perjuangan pemberlakuan Syari'at Islam, mulai dari sejarah partai PBB, asas dan tujuan partai, visi dan misi partai PBB, pandangan PBB tentang Syari'at Islam dan perjuangan PBB dalam pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara detail persepsi PBB tentang Syari'at Islam dan perjuangannya selama ini di Indonesia. Sedangkan kesimpulan dan saran-saran akan menjadi penutup pada bab IV.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Piagam Jakarta merupakan strategi Partai Bulan Bintang untuk memperjuangkan Syari'at Islam secara konstitusi. Strategi yang dilakukan, PBB tetap konsisten memperjuangkan pemberlakuan Syari'at Islam dalam peundang-undangan secara demokratis, sah dan konstitusional dan memaksimalkan potensi beberapa daerah yang menjadi basis massa PBB untuk menjadikan al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber dari Perda dan aturan-aturan yang lain. Oleh karenanya PBB dapat mengambil ruang siasat negosiasi, mensosialisasikan dan mentransformasikan tentang pemahaman Syari'at Islam, baik pada pemerintah maupun terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena selama ini penerapan Syari'at Islam masih ditakuti dan dikhawatirkan oleh pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri.

Sebagai penopang operasional dari strategi tersebut, PBB melakukan langkah-langkah yaitu; pertama, meningkatkan konsolidasi dan pemberdayaan partai terutama membangun jaringan partai sampai tingkat paling bawah. Kedua, melakukan pembinaan dan pengembangan spirit Ukhuwah Islamiyah dengan menghormati pluralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, membangun citra partai sebagai partai Islam yang dicintai dan dekat dengan umat serta dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat. Keempat,

melakukan aktivitas yang menyentuh kepentingan umat. Kelima, melakukan upaya-upaya pemberdayaan generasi muda dan perempuan. Keenam, melakukan persiapan dini untuk pemilu 2009. Ketujuh, menentukan sikap politik yang tepat dan Islami menghadapi pemilihan umum 2009.

## **B. Saran-saran**

1. Penegakan Syari'at Islam bukan persoalan mudah sebab tidak semua elemen khususnya partai politik menginginkan penegakan Syari'at Islam secara konstitusional, oleh karenanya perlu adanya upaya untuk menyamakan persepsi tentang pemahaman Syari'at Islam dan bentuk implementasinya di Indonesia sebab selama ini yang cukup dominan adalah penegakan Syari'at Islam secara kultural atau lebih pada kesadaran individu dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk dari manifestasi imannya kepada Allah swt.
2. Secara eksternal di antara partai-partai Islam tidak satu persepsi dalam upaya penegakan Syari'at Islam sehingga perjuangannya mudah dipatahkan dan dimentahkan oleh lawan-lawan politiknya di parlemen. Selain hal tersebut, kekuatan partai Islam yang hendak menegakkan Syari'at Islam secara konstitusi masih kalah dominan dibandingkan dengan kekuatan politik yang tidak menginginkan pemberlakuan Syari'at Islam secara konstitusi. Dan secara internal, Partai Bulan Bintang masih harus berbenah diri agar cita-cita untuk menegakkan Syari'at Islam secara konstitusional dapat dicapainya, seperti pengkaderan partai dan usaha dalam pemenangan pemilu. Paraktis

untuk mencapai upaya tersebut, Partai Bulan Bintang lebih optimal membangun citra partai dan mengupayakan agar khalayak masyarakat Indonesia mau menerima konsep Syari'at Islam yang diidealkan oleh PBB serta mengupayakan agar mendapat dukungan secara politik dari partai-partai lain di parlemen.

3. Penyusun menyadari bahwa penelitian ini belum cukup mampu menjelaskan permasalahan secara komprehensif, karena keterbatasan akses terhadap referensi dan sumber data yang dibutuhkan, serta kemampuan penyusun dalam melakukan penelitian. Untuk itu, kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi mengenai diskursus perjuangan pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia, terlebih tentang perjuangan sejumlah partai Islam dalam memperjuangkan Syari'at Islam secara politik dan konstitusional.
4. Atas kekuarangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengharapkan masukan dan kritik dari pihak manapun demi perbaikan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini, serta bisa dilanjutkan dalam diskursus yang lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Departemen Agama RI, 1989.

### B. Fiqh/ushul fiqh.

Abdillah, Maskuri, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, cet.I, Jakarta: Renaisan, 2005.

A. Tihami, "Eksprimentasi Syari'at Islam di Provinsi Aceh," dalam Maskuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, cet I, Jakarta: Renaisan, 2005.

Arif, Abd Salam. "Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara," dalam A. Maftuh Abegabriel, dkk, (ed), *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004.

Arinanto, Satya, "Piagam Jakarta dan Cita-cita Negara Islam" dalam kurniawan zein dan Sarifudin HA (ed), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No; Delema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

Amal, Taufik Adnan dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Negeria*, cet I, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Effendy, Bahtiar. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Husin Al-Munawar, Said Agil, "Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Beberapa Soal yang Segera Dirumuskan" Prolog dalam buku *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, cet.I, Jakarta: Renaisan, 2005.

Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, cet I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Maarif, Ahmad Syafi'i, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.

- Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa, Asep Hikam, cet VI, Bandung: Mizan, 1998.
- Nurrahman, "Formalisasi Syari'at Islam di Daerah-Daerah: Sebuah Catatan Kritis," dalam Maskuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, cet I, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, cet, I Jakarta: Teraju, 2002.
- Usmuni, Muhammad Abdul Mujib. *al-Qowā'idul Fiqhīyah*, Rembang: Ma'had Raudhatut Thalibin, t.t.
- Tholib, Ja'far Umar. "Pasang Surut Perjuangan Menegakkan Syariat Islamiyah" dalam Maskuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, cet I, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Wahono, H. Untung, *Penegakan Syari'at Islam dan Koalisi Partai: Menjawab Tuduhan Terhadap PK Sejahtera*, Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003.
- Wahid, Marzuki dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

### **C. Buku Lain-lain.**

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.
- AD/ART Partai Bulan Bintang, Jakarta: DPP PBB, 2005.
- AD/ART Partai Bulan Bintang, Jakarta: DPP PBB, 2006.

- Anderson, Ben. *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, alih bahas Jiman Rumbo, cet I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Afifuddin, Ahmad, "Sistem Pemerintahan di Indonesia dalam Pandangan Partai Bulan Bintang", *Skripsi* Fakultas Syariah, tidak diterbitkan, 2003.
- Anwar, Syafi'i, kata pengantar buku Abdurrahman Wahid "*Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*." Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Anhar, H. Masroer. dkk, *Pedoman Pesantren Modern Terbuka (PMT)*, Jakarta: DPP PBB, 2006.
- Anshari, Endang Saifuddin, M.A, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ali, Fahri, kata Pengantar, *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik*, Jakarta: Pustaka Antara, 1984.
- Amir, Zainal Abidin, *Peta Politik Islam Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. XX, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Basir, Faisal, *Etika Politik: Pandnagn Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Buyung Nasution, Adnan. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafiti, 1995.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fuad, "Pergulatan Islam dan Negara" Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2007.
- Haris, Syamsudin, "Kekuasaan Transisional: Problem Penyelenggaraan Pemilu 1999", dalam Juri Ardiantoro F, *Transisi Demokrasi; Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, Jakarta: KIPP, 1999.

- Ismail, Faisal. *Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Indryana, Deny. *Amandemen UUD 1945: Antara Metos dan Pembongkaran*, cet II, Bandung: Mizan, 2007.
- J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Kahin, George Mc Turnan. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, cet II, alih bahasa Nin Bakdi Soemanto, Yogyakarta: UNS Press, 1995.
- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, cet. II, Jakarta: Gramidia, 1993.
- "Metode Pengumpulan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang, Jakarta: DPP PBB, 2005.
- Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.
- Latif, Yudi. *Intelegensia Muslim dan Kuasa; Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke 20*, cet I, Bandung: Mizan, 2005.
- Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2004.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, alih bahasa Satrio Wahono, dkk, cet II, Jakarta: Serambi, 2005.
- Noer, Deliar. *Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- Pandangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, Jakarta: DPP PBB, 2002.
- Pedoman Pengkaderan dan Pedoman Dasar Badan Pengelola Pengkaderan, Jakarta: DPP PBB, 2006.
- PPP 30 Tahun Bersama Umat, (Jakarta: Panitia Mukhtar V PPP, 2003).

S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto, *Pergulatan Ideologi Partai Politik di Indonesia; Nasionalisme, Islamisme, Komunisme, Militerisme*, Jakarta: Inti Media Publisher, 2006.

Sihombing, Frans Bona, *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-Nilai Politik*, cet. I, Jakarta: Erlangga, 1984.

Sabon, Max Boli, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sekilas Tentang Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: DPP PKS, 2003).

Sekilas Jati Diri Partai Keadilan Sejahtera, (DPW PKS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004).

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbitan di Bawah Bendera Revolusi, 1964.

Subekti, Valina Singka. *Menyusun Konstitusi Transisi; Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Prubahan UUD 1945*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Tafsir Asas Partai Bulan Bintang, Jakarta: DPP PBB, 2005.

#### **D. Jurnal dan Makalah.**

Anwar, Syafi'i. "Agama, Negara, dan Dinamika Civil Islam di Indonesia," dalam *Al-Wasathiyyah*, Volume I No. 3, 2006.

-----, "Agama, Negara, dan Dinamika Civil Islam di Indonesia," dalam *Al-Wasathiyyah*, Volume I No. 4, 2006.

Effendy, Bahtiar. "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Di Indonesia" dalam *Prisma* No. 5 Tahun XXIV Mei 1995.

Mudzhar, Atho', "Penelitian Agama dan Keagamaan," *Makalah* untuk Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-Dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

### E. Media Masa dan Internet

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0202/11/nas07.html>, diakses 12 April 2008.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0005/01/nasional/pres07.htm>, diakses 28 April 2008.

<http://www.sriwijayapost.co.id>, diakses 8 Maret 2008.

”Perjuangkan Piagam Jakarta” (13/11/2006), [pbb-online.org](http://pbb-online.org). diakses 26 Mei 2008.

”PBB Konsisten Perjuangkan Syariat Islam,” *Berita Sinar Harapan*, (Sabtu, 21/02/2004).

”PBB Tidak Akan Surut Perjuangkan Piagam Jakarta” *Berita Kompas*, (Senin, 25/08/2003).

”Partai Bintang Bulan Dideklarasikan” *Berita Kompas*, (Senin/22/01/2007).

”Pro-Kontra Perubahan Pasal 29 UUD 45, Membakar Api Disintegrasi?” *berita Bali Post*, (Selasa, 08/08/2000), <http://www.Indo-News.com/html>. Diakses tanggal 12 Maret 2008.

Risalah rapat pleno ke-28 panitia ad hoc I badan pekerja MPR 17 Juni 2002, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR, 2002). <http://www.mpr.co.id>

Tumbuh dari Pluralitas, *berita kompas*, (Kamis, 27/04/2000).

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).